



THE IMPLICATION OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM, FINANCIAL PERFORMANCE MEASUREMENT AND DECISION MAKING AUTHORITY TO THE PERFORMANCE ACCOUNTABILITY

PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, UKURAN KINERJA KEUANGAN DAN OTORITAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA

Novaliastuti Masiaga

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Gorontalo
Jalan A. A. Wahab No. 247, Limboto, Kabupaten Gorontalo
Email: novamasiaga01@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the variables that affect the performance accountability of the Boalemo Regency government. Data collection was carried out by giving questionnaires to 30 OPDs in the local government of Boalemo Regency and also by interviewing several financial subdivisions. The statistical method used to test the hypothesis is and multiple linear regression.

The results of the study show that. First, accounting information systems, measures of performance and decision-making authority have a positive effect on performance accountability. Second, information systems and decision-making authority partially have a positive and significant influence on performance accountability. Third, the measure of financial performance partially has a negative and insignificant effect on the performance accountability of Boalemo District Government agencies. It can also be seen from the Determination Test that 32% increase in the accountability performance of Buol district government agencies can be explained by accounting information systems decision making while the rest can be explained by other variables at 68%.

Keywords: Accounting Information System; Measures of Financial Performance; Decision Making Authority; Performance Accountability.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji variabel-variabel yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Boalemo. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada 30 OPD di pemerintah daerah Kabupaten Boalemo dan juga dengan mewawancarai beberapa kasubag keuangan. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dan regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Pertama, system informasi akuntansi, ukuran kinerja dan otoritas pengambilan keputusan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Kedua, system informasi dan otoritas pengambilan keputusan secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Ketiga, ukuran kinerja keuangan secara parsial berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Boalemo. Dapat dilihat pula dari Uji Determinasi bahwa kenaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten buol sebesar 32% yang dapat dijelaskan oleh system informasi akuntansi, ukuran kinerja keuangan dan otoritas pengambilan keputusan sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain sebesar 68%..

Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi; Ukuran Kinerja Keuangan; Otoritas Pengambilan Keputusan; Akuntabilitas Kinerja.

1. PENDAHULUAN

Pada awalnya pemerintah dibentuk untuk melindungi sistem ketertiban masyarakat. Dengan kata lain pemerintah merupakan sekumpulan orang-orang yang mengolah kewenangan- kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan mengkoordinasi pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga mereka yang ditempatkan.

Menurut Bachtiar Arif dkk (2002:3) mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklaifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut. Dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintah dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. Untuk mencapai target kemajuan suatu negara, maka tentunya pemerintah dan masyarakat merupakan komponen utama dalam proses pencapaian tujuan pembangunan yang harus secara gesit mampu memecahkan segala problematika lokal maupun nasional. Untuk mendapatkan pemerintah yang baik tentunya harus adanya sistem. Sistem yang dimaksud adalah suatu sistem informasi akuntansi yang dapat menyimpan dan memproses data untuk menghasilkan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan. Disamping itu harus adanya kinerja yang baik. Kinerja yang dimaksud adalah kinerja keuangan.

Kinerja merupakan luaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (Permendagri No.13/2006).

Menurut Laudon (2007) Sistem informasi merupakan sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi. Dalam sistem informasi diperlukan klasifikasi alur informasi, hal ini disebabkan keanekaragaman kebutuhan akan suatu informasi oleh pengguna informasi. Sistem informasi juga ikut berpengaruh terhadap kinerja. Kinerja pemerintah daerah erat hubungannya dengan sistem informasi akuntansi.

Tingkat penggunaan teknologi informasi memberikan manfaat yang lebih besar dan akan meningkatkan kinerja pengguna. Jika informasi yang dihasilkan dari *software* akuntansi yang digunakan semakin akurat, tepat waktu, dan memiliki reliabilitas yang baik, maka akan semakin meningkatkan sikap penerima pemakai sistem tersebut. Peningkatan kepercayaan pemakai sistem informasi, diharapkan akan semakin meningkatkan kinerja mereka. (Wibowo Arief, 2007).

Menurut Mardiasmo (2002:20) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas

meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktifitas yang dilakukan. Akuntabilitas merupakan konsep yang luas dengan mensyaratkan agar pemerintah memberikan laporan mengenai penguasaan atas dana-dana publik dan penggunaannya sesuai peruntukannya.

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan secara menyeluruh tidak berhenti pada tahap awal penganggaran, namun dibutuhkan peran manajerial pimpinan daerah khususnya pengelola keuangan yang ada di daerah.

Permasalahan yang melanda Pemerintah saat ini yaitu adanya pemikiran aparatur pemerintah bahwa ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya hanya bertumpu pada kemampuan instansi dalam menyerap anggaran yang dialokasikan, yakni keberhasilan instansi hanya ditekankan pada aspek input tanpa melihat tingkat output maupun dampaknya yang kemungkinan masih jauh dari standar.

Oleh sebab itu, di instansi Pemerintah Kabupaten Boalemo masih banyak yang kurang baik, salah satunya adalah berhasil atau tidaknya program dan kegiatan yang dilakukan hanya berdasarkan penyerapan anggaran, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dianggap sebagai formalitas dan rendahnya kualitas substansi, serta kurangnya pemahaman tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) yang tidak bergerak disebabkan tidak adanya komitmen yang kuat dari kepala Daerah. Dengan kata lain harus adanya system informasi akuntansi dan ukuran kinerja keuangan serta otoritas pengambilan keputusan disetiap bagian-bagian yang ada didalam OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kabupaten Boalemo.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yakni untuk menguji pengaruh sistem informasi akuntansi, ukuran kinerja keuangan, otoritas pengambilan keputusan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Boalemo.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Definisi Operasional Variabel

a. Sistem Informasi Akuntansi (X₁)

Sistem informasi akuntansi adalah susunan dari berbagai dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksana, dan berbagai laporan yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan dari sebuah perusahaan atau organisasi menjadi informasi keuangan yang berguna dan bermanfaat (Widjajanto 2001) dan Sistem informasi Akuntansi terdiri dari 3 indikator yaitu indikator relevan, kegunaan, prosedur.

b. Ukuran Kinerja Keuangan (X₂)

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang

dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Robertson 2002) dan Ukuran kinerja keuangan terdiri dari 3 indikator yaitu indikator kebijakan, dapat dibandingkan, akuntabel.

c. Otoritas pengambilan keputusan (X₃)

Otoritas pengambilan keputusan sebagai suatu kondisi dimana seseorang mempunyai otoritas atau hak untuk membuat keputusan dengan persyaratan yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam rangka mencapai tujuan strategi organisasi. (Cavalluzzo dan Ither:2003) dan Otoritas Pengambilan keputusan 2 indikator yaitu indikator komitmen, tanggung jawab.

d. Akuntabilitas Kinerja (Y)

Kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo:2002) dan Akuntabilitas kinerja terdiri dari 4 indikator yaitu indikator akuntabilitas kejujuran, hukum, program, dan kebijakan.

2.2 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan:

X₁ : Sistem informasi Akuntansi

X₂: Ukuran Kinerja Keuangan

X₃ : Otoritas pengambilan keputusan

Y : akuntabilitas kinerja

b₁, b₂, b₃ : koefisien regresi

a : konstanta

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

a. Uji Koefisien Regresi

Analisis pengujian kecocokan model regresi dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda. Uji awal untuk memastikan kecocokan model regresi system informaisi akuntansi, ukuran kinerja keuangan dan otoritas pengambilan keputusan terhadap akuntabilitas kinerja adalah mendeteksi nilai korelasi yang disimbolkan dengan (R). Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS, diperoleh nilai korelasi (R) sebagai berikut:

Tabel 1. Uji Korelasi

| Model Summary ^b | | | | | |
|----------------------------|-------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin Watson |
| 1 | 0.861 | 0.320 | 0.283 | 1.542 | 2.093 |

a. Predictors: (Constant), OTORITAS, UKURAN, SIA
b. Dependent Variable: KINEJRA

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 1, maka dapat diketahui bahwa nilai korelasi (R) sebesar 0,566 yang berarti bahwa nilai korelasinya mendekati 1 atau berada pada kategori cukup, berdasarkan skor tersebut, maka dapat di ketahui bahwa jika system informasi akuntansi, ukuran kinerja keuangan, otoritas pengambilan keputusan ditingkatkan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan baik.

b. Uji koefisien determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi diperuntukkan untuk menilai perubahan nilai turunya variable akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di OPD Kabupaten Boalemo dapat dijelaskan oleh sistem informasi akuntansi, ukuran kinerja keuangan dan otoritas pengambilan keputusan. Hasil analisis dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai koefisien determinasi atau R-Square (R²) sebesar 0,320 atau 32,0%. Hal ini memberikan informasi bahwa perubahan kenaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di OPD-OPD Kabupaten Boalemo 32,0% dapat dijelaskan oleh system informasi akuntansi, ukuran kinerja keuangan dan otoritas pengambilan keputusan. Sedangkan sisanya 68,0% dijelaskan oleh variable lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

c. Uji t

Uji t adalah pengujian tingkat signifikan dalam membuat suatu kesimpulan pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), dalam hal ini pengujian dilakukan secara parsial dengan membandingkan antara nilai T_{hitung} dengan T_{tabel} atau nilai signifikan kurang $\alpha = 0,05$ maka kriteria keputusannya adalah menerima hipotesis, dengan menggunakan kebebasan (*degree of freedom*) 95% atau $\alpha = 5\%$ (0,05).

Hasil uji t adalah:

1. Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja secara parsial hal ini dibuktikan dengan nilai T_{hitung} (2.766) > nilai dari T_{tabel} (1.671) dan nilai signifikan 0,008 < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_{a1} diterima
2. Ukuran kinerja keuangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja secara parsial hal ini dibuktikan dengan T_{hitung} (-

0,125) < T_{tabel} (1.671). dan nilai signifikan $0.901 < 0,05$ maka H_0 diterima dan H_{a2} ditolak.

3. Otoritas pengambilan keputusan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja secara parsial hal ini dibuktikan dengan nilai T_{hitung} (2.431) > nilai dari T_{tabel} (1.671) dan nilai signifikan $0.018 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_{a3} diterima

d. Uji F

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara system informasi akuntansi, ukuran kinerja keuangan dan otoritas pengambilan keputusan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara bersama-sama.

Diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 8.640 dan signifikan 0, .000. karena $0, .000 < 0,05$ dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ (8.640 > 2,77) maka dapat disimpulkan bahwa system informasi akuntansi, ukuran kinerja keuangan, otoritas pengambilan keputusan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Boalemo.

e. Uji Regresi linier Berganda

Uji Regresi Linear Berganda merupakan salah satu alat statistik Parametrik dengan fungsi menganalisis dan menerangkan keterkaitan antara dua atau lebih faktor penelitian yang berbeda nama, melalui pengamatan pada beberapa hasil observasi (pengamatan) di berbagai bidang kegiatan. Berkaitan dengan penelitian ini alat analisis Statistik Parametrik Regresi Linear Berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X_1 , X_2 dan X_3) terhadap variabel dependen (Y). Dalam konteks penelitian ini Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengukur pengaruh system informasi akuntansi (X_1), ukuran kinerja keuangan (X_2), otoritas pengambilan keputusan (X_3) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil analisis Regresi Linear Berganda dengan menggunakan bantuan *software SPSS* diperoleh hasil-hasil penelitian dari 30 Organisasi Perangkat Daerah (responden) dengan dugaan pengaruh ketiga variabel independen (Sistem informasi akuntansi, ukuran kinerja keuangan, otoritas pengambilan keputusan) terhadap variabel dependen (Akuntabilitas kinerja).

$$Y = 6.905 + 0.473X_1 + (-0.20X_2) + 0.583X_3$$

Dalam persamaan regresi diatas, konstanta (B) adalah sebesar 6.905 hal ini berarti jika tidak ada perubahan variabel system informasi akuntansi (X_1), ukuran kinerja keuangan (X_2) dan otoritas pengambilan keputusan (X_3) yang mempengaruhi maka akuntabilitas kinerja instansi yang terjadi pada Kabupaten Boalemo sebesar 6.905. Sedangkan uji regresi berganda untuk variabel independen dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel system informasi akuntansi menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.473. Tanda positif pada koefisien regresi menunjukkan bahwa dengan adanya system informasi akuntansi yang memadai maka akan

meningkatkan akuntabilitas kinerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.

2. Variabel ukuran kinerja keuangan menunjukkan pengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.20 . Tanda negative pada koefisien regresi menunjukkan bahwa dengan adanya ukuran kinerja keuangan berpengaruh tetapi hanya benpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.
3. Variabel otoritas pengambilan keputusan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.583 . Tanda positif pada koefisien regresi menunjukkan bahwa dengan adanya otoritas pengambilan keputusan yang baik maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.

f. Pengujian Hipotesis

Berdasarkan pada hasil uji signifikan parsial diatas dapat diuraikan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

1. System Informasi Akuntansi Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Berdasarkan perhitungan model koefisien regresi system informasi akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah sebesar 2.766 . Nilai sig = $0,008$ lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$. Karena nilai signifikannya lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$, maka koefisien regresi system informasi akuntansi (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (Y). maka Ha1 menyatakan bahwa system informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (Y) diterima.

2. Ukuran Kinerja Keuangan Berpengaruh negatif dan tidak signifikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Berdasarkan perhitungan model koefisien regresi Ukuran kinerja keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah sebesar -125 . Nilai sig = 0.901 lebih besar dari nilai $\alpha = 0,05$. Karena nilai signifikannya lebih besar dari nilai $\alpha = 0,05$, maka koefisien regresi ukuran kinerja keuangan (X2) berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (Y). maka H0 menyatakan bahwa ukuran kinerja keuangan berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (Y) tidak diterima.

3. Otoritas Pengambilan Keputusan Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Berdasarkan perhitungan model koefisien regresi otoritas pengambilan keputusan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah sebesar 2.431 . Nilai sig = 0.018 lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$. Karena nilai signifikannya lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$, maka koefisien regresi otoritas pengambilan keputusan (X3) berpengaruh positif dan signifikan

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (Y). maka Ha3 menyatakan bahwa otoritas pengambilan keputusan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (Y) diterima.

3.2 Pembahasan

3.2.1 System informasi akuntansi X₁ terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y)

Berdasarkan uji parsial yang telah dilakukan antara sistem informasi akuntansi X₁ terhadap Akuntabilitas kinerja sebagai variabel Y menunjukkan bahwa $T_{hitung} (2.766) >$ nilai dari $T_{tabel} (1.671)$ dan nilai signifikan $0,008 < 0,05$ maka hal ini berarti menerima hipotesis sehingga dapat dikatakan bahwa variabel system informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Boalemo. Hal ini dapat dibuktikan juga dalam uji koefisien determinasi, yaitu R square sebesar 0.244 yang memperlihatkan bahwa 24,4% akuntabilitas kinerja dipengaruhi oleh system informasi akuntansi, sedangkan sisanya 75.6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini yaitu berupa partisipasi anggaran dan peran manajerial dalam pengelolaan keuangan.

Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena system informasi akuntansi sangat dibutuhkan di sektor pemerintahan. dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai sudah mulai menggunakan sistem informasi berbasis komputer terutama dalam pengelolaan keuangan. Disamping itu system informasi akuntansi juga dapat membantu dalam pencapaian kinerja terutama dalam pengelolaan data keuangan sehingga akan terwujudnya transparansi.

Dapat dilihat pula dari Sistem Informasi Manajemen Daerah bahwa semua yang tertera di Sistem tersebut dapat didistribusikan disetiap Organisasi Perangkat Daerah dengan sistem database terintegrasi, sehingga outputnya dapat dipergunakan oleh pimpinan daerah untuk membantu proses pengambilan keputusan. Disamping itu dapat dilihat dari banyaknya responden yang menjawab sangat setuju dengan adanya pernyataan tentang system informasi manajemen daerah keuangan menghasilkan laporan yang memiliki manfaat yang dapat dipercaya, dan juga pernyataan seperti pemanfaatan teknologi informasi akuntansi membuka peluang untuk mengakses, mengolah, dan mendayagunakan informasi keuangan secara tepat waktu.

Tujuan adanya sistem informasi akuntansi di OPD akan membuat akuntabilitas keuangan pemerintah menjadi transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga pelaporan keuangan yang menjadi bagian dari kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan akan selesai tepat waktu.

Hal ini juga menunjukkan bahwa system informasi yang terintegrasi dapat membantu pemerintah daerah dalam mencapai tujuan-tujuan sehingga berdampak pada kinerja Pemerintahan.

3.2.2 Ukuran kinerja Keuangan (X_2) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y)

Berdasarkan uji parsial yang telah dilakukan antara Ukuran Kinerja Keuangan X_2 terhadap Akuntabilitas kinerja sebagai variabel Y menunjukkan bahwa $T_{hitung} (-125) < \text{nilai dari } T_{tabel} (1.671)$ dan nilai signifikan $901 > 0,05$ maka hal ini berarti hipotesis tidak terbukti.

Hal ini dapat dibuktikan juga dalam uji koefisien determinasi, yaitu R square sebesar 0.065 yang memperlihatkan bahwa 6.5% akuntabilitas kinerja dipengaruhi oleh Ukuran kinerja keuangan, ini berarti pengaruh ukuran kinerja terhadap akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah kabupaten Boalemo masih terbilang lemah sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Ukuran kinerja keuangan berpengaruh negative dan tidak signifikan karena tidak adanya komunikasi yang baik antara Pimpinan dan Bawahan sehingga tidak adanya keterbukaan tentang pengelolaan keuangan serta kurangnya kesesuaian kebijakan dan prosedur yang dilakukan.

Keefektifan itu dapat terjadi apabila anggaran yang ditargetkan sesuai dengan realisasi yang dilakukan. Meskipun setiap tahunnya PAD nya meningkat tetapi untuk tahun 2017 anggaran dan realisasi tidak sesuai.

Disamping itu, Anggaran yang tercantum dalam Laporan realisasi Anggaran disetiap OPD berbeda-beda karena disetiap OPD memiliki kegiatan yang berbeda sesuai dengan yang tercantum pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Sehingga untuk ukuran kinerja keuangan disetiap OPD tidak akan sama ukurannya.

3.2.3 Otoritas pengambilan keputusan X_3 terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y)

Berdasarkan uji parsial yang telah dilakukan antara otoritas pengambilan keputusan X_3 terhadap Akuntabilitas kinerja sebagai variabel Y menunjukkan bahwa $T_{hitung} (2.431) > \text{nilai dari } T_{tabel} (1.671)$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,018$ maka hal ini dapat dikatakan bahwa variabel Otoritas pengambilan keputusan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Boalemo sehingga menerima hipotesis. Pengaruh antara otoritas pengambilan keputusan terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Boalemo menunjukkan bahwa semakin baik otoritas pengambilan keputusan maka akan semakin baik pula akuntabilitas kinerja. Kurangnya otoritas pengambilan keputusan akan berdampak pada kurangnya tingkat akuntabilitas kinerja pemerintahan dan akan menyebabkan timbulnya keputusan tentang kinerja dan sumber daya yang tidak diinginkan sehingga mengarah pada penurunan kualitas pelayanan.

Hal ini dapat dibuktikan juga dalam uji koefisien determinasi, yaitu R square sebesar 0.220 yang memperlihatkan bahwa 22% akuntabilitas kinerja dipengaruhi oleh Otoritas Pengambilan Keputusan sedangkan sisanya 68% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini yaitu berupa keterbatasan system informasi dan komitmen manajemen. Sehingga dapat

dilihat bahwa otoritas pengambilan keputusan sudah terlaksana dengan cukup baik terhadap akuntabilitas kinerja dan juga dilihat dari LRA setiap tahunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo meningkat itu karena pimpinan melakukan otoritas yang sesuai meskipun masih banyak yang perlu diperbaiki.

4. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa : (1) Sistem informasi Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Boalemo. Artinya bahwa dengan adanya sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan kemampuan untuk mengolah, menganalisa dan mengkomunikasikan informasi finansial sehingga dapat membuat akuntabilitas kinerja semakin baik. Dapat dilihat pula dari Sistem Informasi Manajemen Daerah bahwa semua yang tertera di Sistem tersebut dapat didistribusikan di setiap Organisasi Perangkat Daerah dengan sistem database terintegrasi, sehingga outputnya dapat dipergunakan oleh pimpinan daerah untuk membantu proses pengambilan keputusan. (2) Ukuran kinerja keuangan berpengaruh Negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Boalemo, Karena kurangnya kesesuaian kebijakan dan prosedur yang dilakukan. Disamping itu, dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Boalemo, jika dilihat dari setiap OPD bahwa untuk Anggaran yang tercantum dalam Laporan realisasi Anggaran di setiap OPD berbeda-beda karena di setiap OPD memiliki kegiatannya yang berbeda sesuai dengan yang tercantum pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Sehingga untuk ukuran kinerja keuangan di setiap OPD tidak akan sama ukurannya. (3) Otoritas pengambilan keputusan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Boalemo, yang berarti bahwa dengan adanya otoritas pengambilan keputusan dapat membuat kinerja pemerintah lebih baik karena adanya komitmen yang kuat sehingga menghasilkan suatu program yang baik. Disamping itu untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pimpinan harus lebih banyak berkomunikasi dengan bawahan sehingga di saat bawahan yang diberi otoritas untuk mengambil keputusan tersebut harus mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil untuk mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arif Wibowo, 2007. *Kajian tentang Perilaku Penggunaan Sistem Informasi Dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM)*, UNIV Budi Luhur, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta.

- Astuti, Ratih, widya 18 Mei 2011. *Persepsi terhadap pengembangan sistem pengukuran, akuntabilitas, dan penggunaan informasi kinerja di instansi pemerintah Studi pada Pemerintah Kabupaten Semarang*, universitas diponegoro semarang.
- Bachtiar, Arif dkk, 2002. *Akuntansi Pemerintahan*, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.
- Bodnar, George H. 2006, *sistem Informasi Akuntansi*, Edisi Sembilan (Terj.) Julianto Agung Saputra dan Lilis Setiawati. Yogyakarta: ANDI.
- Cavalluzzo, Ken S dan Christopher D. Ittner. 2003. *Implementing performance Measurement Innovations : Evidence From Government*. www. SSRN. com.
- Chriswan Sungkono dan Machmudin Eka P. Jakarta: Salemba Empat.
- Jogiyanto, 2010. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*, Edisi 1V, Andi Offset, Yogyakarta.
- Laudon, Kenneth C dan Jane P. Laudon. 2007. *Sistem Informasi Manajemen*. Edisi ke-10. Terjemahan.
- Ledvina, V.C. 1991. *Accountability, Corruption and Democracy: A Clarification of Concept*. Asian Review of Public Adm inistration Vol.III
- Mahsun, Mohamad, 2012, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Marshall B. Romney, Paul John Steinbart, 2006. *Accounting Information System*, Ninth Edition, Prentice Hall.
- Robertson, 2002, *Perwujudan Akuntabilitas Instansi Pemerintah*, Edisi Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sadjiarto, Arja. 2000. *Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.2, No.2.
- Silvia, Mei 2013. *Pengaruh Keterbatasan Sistem Informasi, Komitmen Manajemen, Dan Otoritas Pengambilan Keputusan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Payakumbuh*. Universitas Negeri Padang.
- Sunyoto, Danang. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: PT Refika Aditama.
- Widjajanto, Nugroho. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Erlangga: Jakarta